



# LAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2021

Jl. Percetakan Negara No. 23 A Jakarta Pusat 10570 Indonesia  
Telepon (021) 4240406, 42882249  
Email : [kontak@bpfkjakarta.or.id](mailto:kontak@bpfkjakarta.or.id)

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.



Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 61 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta mempunyai tugas melakukan pengamanan fasilitas kesehatan diseluruh sarana prasarana pelayanan kesehatan.

Laporan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta merupakan salah satu bentuk/media pertanggungjawaban Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja serta sebagai parameter dalam mengukur pencapaian tingkat keberhasilan kinerja pelaksana program dan kegiatan BPFK Jakarta selama tahun anggaran 2021. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Tupoksi di BPFK Jakarta dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Kami berharap dengan adanya masukan dan umpan balik akan memberi

manfaat dalam proses perbaikan kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta di masa mendatang.

Jakarta, 28 Januari 2022

Plt. Kepala Balai Pengamanan Fasilitas  
Kesehatan Jakarta,



dr. Niken Wastu Palupi, MKM.  
NIP.196812312002122006

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta kepada Direktur Pelayanan Kesehatan, serta sebagai sumber informasi untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta tahun 2021 mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis BPFK 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja. Dari sepuluh Indikator Kinerja Utama ada Tujuh Indikator Kinerja Utama yang capaiannya melampaui target diantaranya Indikator Kinerja Utama (IKU.2) Jumlah ruang lingkup pelayanan target 155 tercapai 187, (IKU.3) Jumlah ruang lingkup akreditasi target 60 realisasi 79, (IKU.4) Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki target 45 realisasi 54, (KPI.6) Presentase institusi penguji fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan target 70% realisasi 75%, (IKU.7) Presentase pemenuhan kompetensi SDM target 75% realisasi 88%, (IKU.8) Jumlah sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan target 40000 realisasi 47700, (IKU.9) Pendapatan PNBPN target Rp8.500.000.000 realisasi Rp10.142.583.300,-.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target ke tujuh Indikator dari sepuluh indikator diatas adalah melakukan evaluasi dan monitoring, pengalokasian anggaran sesuai kewenangan, penyiapan SDM yang terlatih dan melakukan bimbingan teknis kepada pegawai.

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah beberapa pelaksanaan kegiatan terhambat karena adanya wabah **COVID-19**, dan pendapatan PNBPN meningkat dipenghujung tahun sehingga pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana PNBPN tidak sepenuhnya terealisasi. Upaya pemecahan masalah yang diusulkan adalah melakukan evaluasi terhadap

piutang PNBP sarpelkes yang belum tertagih, melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait.

Alokasi anggaran Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta untuk Tahun 2021 adalah sebesar **Rp38.204.327.000,-** terdiri dari : sumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp30.907.927.000,- yaitu untuk : Alat Kesehatan, Kendaraan Bermotor, Layanan Sarana Prasarana Internal dan Layanan Perkantoran, dan kegiatan yang bersumber dari anggaran Non BLU(PNBP) sebesar Rp7.296.400.000,- yaitu untuk Layanan Operasional UPT Non BLU, Obat-obatan dan bahan medis habis pakai serta Layanan Sarana dan Prasarana Internal.

Total Realisasi sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebesar **Rp35.526.091.678,- atau sebesar (92,99%)**, realisasi sumber dana dari rupiah sebesar Rp29.441.443.255,- (95,26%), realisasi sumber dana dari PNBP sebesar Rp6.084.648.423,- (83,39%).

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	4
Ringkasan Eksklusif	6
Daftar Isi	7
Bab I Pendahuluan	7
A. Latar Belakang	7
B. Penjelasan Umum Organisasi	8
C. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi	10
D. Aspek Strategis Organisasi serta permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi	11
E. Sistematika Penulisan	12
Bab II Perencanaan & Perjanjian Kinerja	15
II.1 Perencanaan Kinerja	15
II.2 Perjanjian Kinerja	17
Bab III Akuntabilitas Kinerja	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19-57
A.1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	
A.2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	
A.3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
A.4. Membandingkan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional (Jika ada)	
A.5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.	
A.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	
A.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN</b> : 1. Perjanjian Kinerja	60
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	62
3. Realisasi Anggaran	63-64
4. SK Tim LAKIP	65-67

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, senantiasa berusaha melaksanakan sistem kerja pemerintahan secara bijaksana, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Hal ini sesuai dengan prinsip *good governance* seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Laporan kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan Direktur Pelayanan Kesehatan bersama Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta, terdiri atas 8 (delapan) sasaran program, yaitu Terwujudnya kepuasan pelanggan, Peningkatan cakupan jenis pelayanan Sarana Prasarana alat yang terakreditasi, Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum, Pengembangan sarana dan prasarana BPFK Jakarta, Peningkatan pembinaan teknis institusi pengujian pemerintah dan swasta, Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia sesuai visi dan misi BPFK Jakarta, Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan, Terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel. Adapun pengukuran kinerja untuk sasaran program tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) indikator, yaitu:

1. Indeks kepuasan pelanggan.
2. Jumlah ruang lingkup pelayanan
3. Penambahan ruang lingkup Akreditasi
4. Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki
5. Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator
6. Persentase peserta uji yg memenuhi persyaratan

7. Persentase pemenuhan kompetensi SDM
8. Jumlah sertifikat/Laporan Hasil yang diterbitkan
9. Pendapatan PNB
10. Realisasi anggaran

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2021. Di samping merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan terkait, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah. Laporan Kinerja ini juga sekaligus menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta di masa yang akan datang.

## **B. Penjelasan Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Tugas pokok Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta adalah melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta menyelenggarakan fungsi :

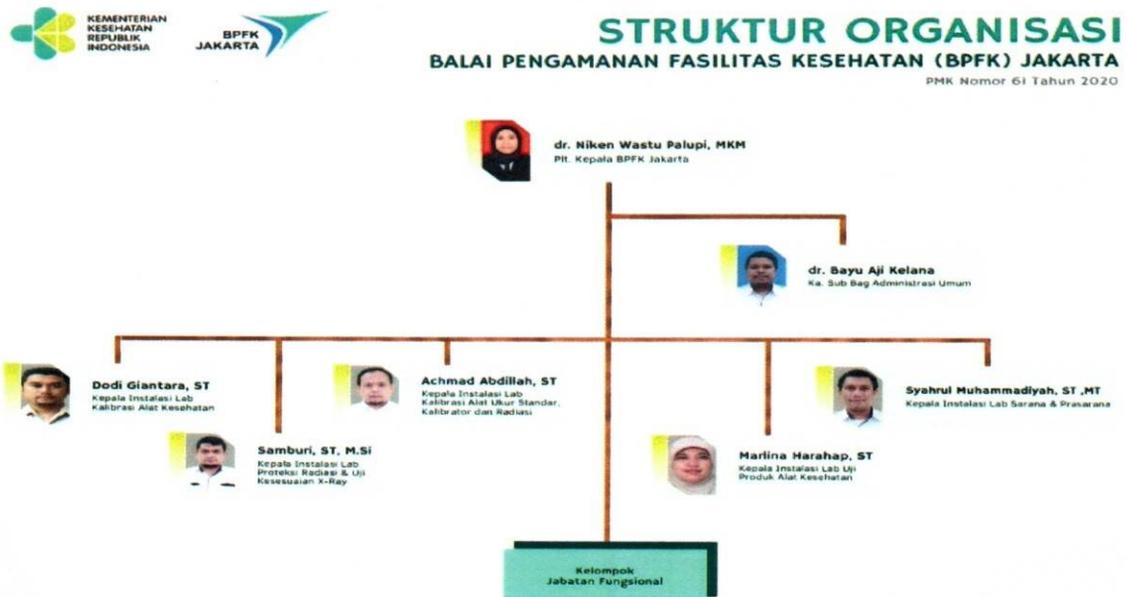
1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
3. Pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan;
4. Pengamanan dan pengukuran paparan radiasi;
5. Pelayanan monitoring dosis radiasi personal;
6. Pengukuran luaran radiasi terapi;
7. Pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan;
8. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana kesehatan
9. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
10. Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang pengamanan fasilitas kesehatan;
11. Pengelolaan data dan sistem informasi;
12. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
13. Pelaksanaan urusan administrasi BPFK

Susunan organisasi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 61 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta sebagai berikut :

1. BPFK Jakarta Tipe A;
2. Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara, urusan kepegawaian, organisasi tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan BPFK;

3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun struktur organisasi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta adalah sebagai berikut :



### C. Aspek Setrategis Organisasi serta Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi organisasi

1. Aspek strategis organisasi pada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta antara lain :
  - a. Memberikan pelayanan kalibrasi alat ukur yang ada di Laboratorium kalibrasi swasta, laboratorium internal di Rumah Sakit dan Laboratorium kalibrasi di Dinas Propinsi dan Kabupaten Kota.
  - b. Membina balai pengujian fasilitas kesehatan dan Institusi Penguji swasta, laboratorium kalibrasi internal rumah sakit

dan laboratorium kalibrasi di dinas propinsi dan kabupaten kota di wilayah binaan yang sudah ditetapkan pemerintah.

- c. Memberikan pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian dan kalibrasi dan proteksi radiasi sesuai dengan standar dan menjangkau seluruh fasyankes.
  - d. Memberikan pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan melalui uji produk alat kesehatan.
  - e. Mewujudkan tata kelola institusi yang bersih, modern dan bertanggungjawab.
2. Isu Strategis yang sedang dihadapi organisasi adalah :
- a. Meningkatkan ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan.
  - b. Menjadi rujukan nasional dalam pengujian kalibrasi peralatan kesehatan ditengah beragamnya standar acuan dalam pengujian kalibrasi alat kesehatan. Apalagi jumlah institusi penguji swasta terus meningkat.
  - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) BPFK untuk mampu mengoptimalkan pelayanan pengujian/kalibrasi, proteksi radiasi dan inspeksi diseluruh fasyankes.
  - d. Perkembangan teknologi kesehatan yang menuntut Sumber Daya Manusia (SDM) BPFK untuk terus meningkatkan kompetensinya.
  - e. Jumlah fasyankes yang terus meningkat sehingga konsumen yang dilayani juga meningkat.
  - f. Meningkatnya jumlah alat kesehatan setiap tahun akan meningkatkan juga permintaan pelayanan kalibrasi.
  - g. Memenuhi kebutuhan peralatan dan standar acuan untuk uji dan kalibrasi.

- h. Memenuhi permintaan uji produk alat kesehatan produksi dalam negeri.
- i. Perencanaan perubahan sistem pengelolaan keuangan dari Non BLU menjadi sistem pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).

#### **D. Sistematis**

Laporan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta tahun 2021 ini menjelaskan pencapaian kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta selama tahun 2021, capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (penetapan kinerja) yang ditetapkan pada awal tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan satu tahun.

Dari analisis atas capaian kinerja diharapkan dapat diidentifikasi berbagai informasi untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Dengan demikian Sistematis penyajian Laporan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta Tahun 2021 disusun sebagai berikut :

#### Bab I      Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issud*) yang sedang dihadapi organisasi.

#### Bab II      Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### Bab III     Akuntabilitas Kinerja

##### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Jika ada);
5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta capaian langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Kinerja**

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis.

Dalam rencana kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta tahun 2021, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPFK Jakarta dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Untuk mendukung Indikator Kinerja Utama Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Visi dan Misi, adapun Visi dan Misi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta adalah sebagai berikut :

#### ***Visi :***

“Menjadi institusi pengujian fasilitas kesehatan rujukan nasional dengan pelayanan prima”

#### ***Misi :***

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, ditetapkan misi BPFK Jakarta yang menggambarkan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BPFK Jakarta. Adapun misi BPFK Jakarta yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian dan kalibrasi dan proteksi radiasi sesuai dengan standar dan menjangkau seluruh fasyankes di propinsi-propinsi yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Membina balai pengujian fasilitas kesehatan dan Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan.

3. Mewujudkan tata kelola institusi yang bersih, modern dan bertanggungjawab.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta melaksanakan perencanaan kinerja melalui proses penetapan kinerja dalam satu tahun anggaran 2021, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Sasaran strategis dan program indicator kinerja utama yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

#### SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA BPFK JAKARTA TAHUN 2020-2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SA TU AN	TARGET						
				2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)								
1	Terwujudnya kepuasan pelanggan	1.1	Indeks kepuasan pelanggan	Nilai						
			- Internal	Nilai	68					
			- Eksternal	Nilai	74	88	90	92	94	
2	Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi	2.1	Jumlah ruang lingkup pelayanan	Jml	129	155	160	165	170	
			2.2	Penambahan ruang lingkup Akreditasi	Jml	54	60	65	70	75
3	Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	3.1	Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki	Jml	30	45	55	65	75	
4	Pengembangan sarana dan prasarana BPFK Jakarta	4.1	Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator	%	55	100	100	100	100	
5	Peningkatan pembinaan teknis institusi pengujian pemerintah dan swasta	5.1	Persentase peserta uji yg memenuhi persyaratan	%	50	70	80	90	100	
6	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPFK Jakarta	6.1	Persentase pemenuhan kompetensi SDM	%	65	75	85	95	100	
7	Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan	7.1	Jumlah sertifikat/Laporan Hasil yang diterbitkan	Jml	35000	40000	42000	45000	50000	
8	Terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel	8.1	Pendapatan PNBP	Jml	8 M	9.5 M	10 M	10.5 M	11 M	
			8.2	Pemenuhan LAKIP		95	-	-	-	-
			8.3	Realisasi Anggaran		100	100	95	96	97

## B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta menyusun perjanjian kinerja tahun 2021 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024. Target kinerja ini menjadi komitmen Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta untuk mencapainya pada tahun 2021.

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Terwujudnya kepuasan pelanggan	1.1	Indeks kepuasan pelanggan	88
2	Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi	2.1	Jumlah ruang lingkup pelayanan	155
		2.2	Penambahan ruang lingkup Akreditasi	60
3	Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	3.1	Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki	45
4	Pengembangan sarana dan prasarana BPFK Jakarta	4.1	Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator	100 %
5	Peningkatan pembinaan teknis institusi pengujian pemerintah dan swasta	5.1	Persentase peserta uji yg memenuhi persyaratan	70 %

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>		<b>TARGET</b>
(1)	(2)		(3)	(4)
6	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPFK Jakarta	6.1	Persentase pemenuhan kompetensi SDM	75 %
7	Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan	7.1	Jumlah sertifikat/Laporan Hasil yang diterbitkan	40000
8	Perwujudan tata kelola keuangan yang akuntabel	8.1	Pendapatan PNBP	8.5 M
		8.2	Realisasi Anggaran	100%

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

##### KPI.1 Indeks kepuasan pelanggan

kepuasan pelanggan adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan pelanggan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pelanggan dalam memperoleh pelayanan dari BPFK Jakarta

Target yang ditetapkan adalah 88.

**Tabel KPI.1**

**Indeks Kepuasan Pelanggan (Internal dan Eksternal)**

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2021	2021
KPI.1	Indeks kepuasan pelanggan	Tata Operasional	88	79

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini :

Target indikator kinerja Indeks Kepuasan pelanggan dan realisasi kinerja terdiri dari :

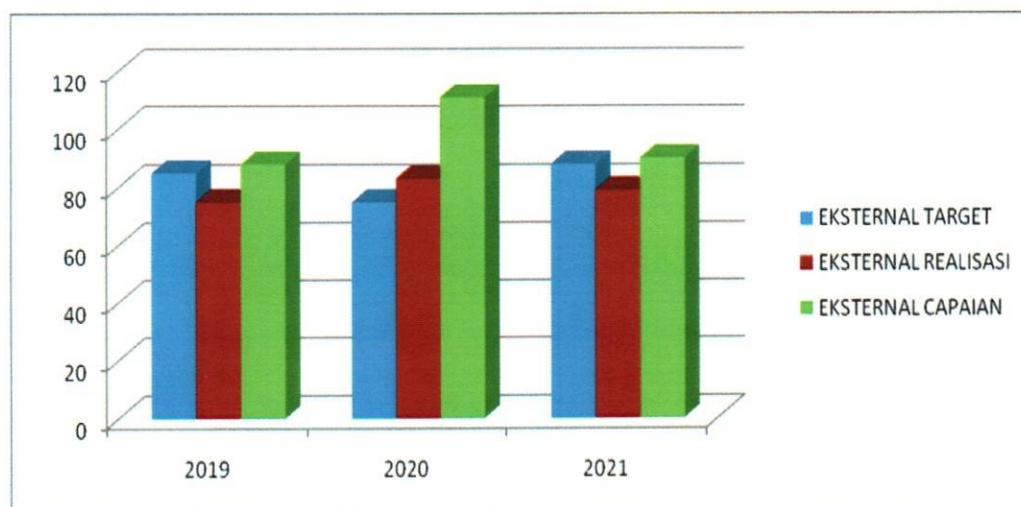
Dari target indeks kepuasan pelanggan tersebut diatas, maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator adalah **BAIK**.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
KPI.1	Indeks kepuasan pelanggan		85	75	88	75	83	79	88%	111%	90 %

Realisasi kinerja indeks kepuasan pelanggan Tahun 2021 sebesar 90%, Tahun 2020 sebesar 111% dan Tahun 2019 sebesar 88%.

Grafik, Indeks Kepuasan Eksternal



3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.
4. Realisasi indeks kepuasan pelanggan pada tahun 2021 sebesar 79 dan realisasi tahun 2020 sebesar 83, sehingga terjadi pencapaian masing-masing sebesar 90% dan 111%.
5. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Berdasarkan Nilai Interval Konversi IKM pada Permen PAN RB No 14 tahun 2017 tentang indek kepuasan masyarakat (pelanggan eksternal ) yang bisa dibandingkan yaitu 76,61 – 88,30 mendapat nilai mutu pelayanan B.

6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Analisa capaian kinerja untuk indeks kepuasan pelanggan internal dan eksternal yaitu ;

- 199 pelanggan menyatakan kepuasan tertinggi pada unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur namun terdapat penilaian rendah pada unsur biaya dan tarif serta waktu penyelesaian.

Alternatif Solusi :

- Mengevaluasi kebijakan supervisi pada pegawai BPFK Jakarta, konsistensi penerapan penghargaan kenaikan pangkat dan jabatan sesuai ketentuan tentang kenaikan pangkat dan jabatan sehingga pegawai mendapatkan imbalan/tunjangan kinerja sesuai dengan Pendidikan, masa kerja, dan tanggung jawab pekerjaan.
- Melakukan monitoring pemenuhan waktu pelayanan dan integrasi pelaporan, melakukan komunikasi prosedur pelayanan melalui website dan kegiatan antara lain : Monitoring dan evaluasi pelayanan, Kaji ulang, Audit Internal dan Temu Pelanggan.

7. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Survey pengambilan data secara langsung atau menggunakan media elektronik dan analisa dilakukan oleh staf seksi Tata Operasional

1. Penggunaan anggaran sesuai Standar Biaya Umum
2. Alokasi anggaran dalam DIPA sebesar Rp 215.238.000 dan realisasi sebesar Rp 141.549.900,- atau 65,76%

8. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kepuasan pelanggan BPFK Jakarta perlu ditunjang oleh pertemuan pelanggan, integrasi pelaporan dan monitoring evaluasi pelayanan serta peningkatan jejaring kerja antar laboratorium.

KPI. 2 Jumlah ruang lingkup pelayanan

Ruang lingkup pelayanan BPFK Jakarta adalah Jenis pelayanan jasa yang diberikan meliputi kalibrasi, inspeksi, uji kesesuaian, TLD, film badge, pelatihan teknis dan non teknis, uji kompetensi , uji produk dan uji profisiensi yang mengacu pada Permenkes 54 tahun 2015, Pemenkes 61 tahun 2020, PP 64 tahun 2019 dan pedoman teknis di K/L terkait.

Target yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah 129 pelayanan.

**Tabel KPI. 2**  
**Jenis Ruang Lingkup Pelayanan**

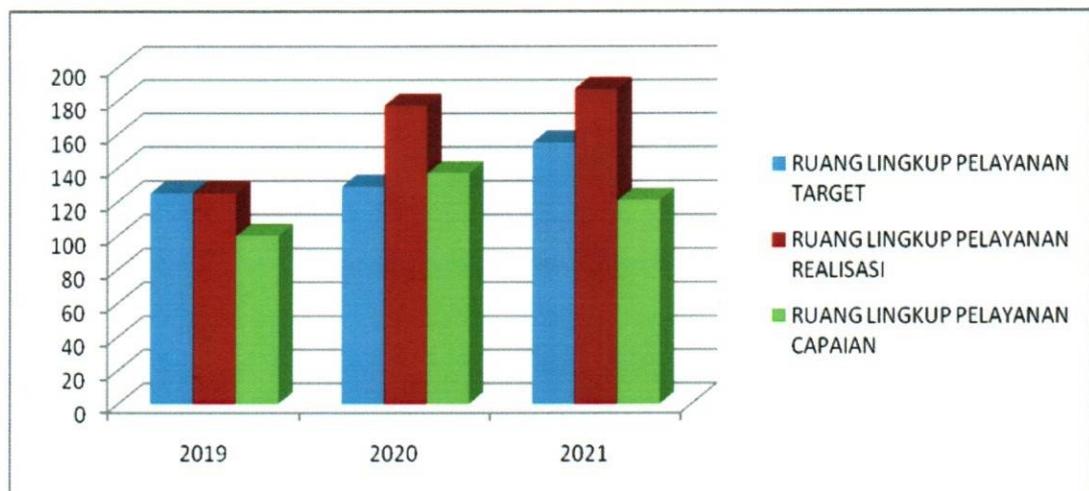
No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2021	2021
KPI.2	Jumlah ruang lingkup pelayanan	Tata Operasional	155 Pelayanan	187

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini Target kinerja yang ditetapkan pada tahun ini sebesar 155 dan realisasi kinerja sebesar 187, maka dapat dinyatakan bahwa kinerja penambahan jenis ruang lingkup pelayanan **Sangat Baik.**
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
KPI. 2	Jenis ruang lingkup pelayanan	Tata Operasional	125	129	155	125	177	187	100%	137%	121%

- Realisasi kinerja jenis ruang lingkup pelayanan Tahun 2021 sebesar 187 jenis alat, Tahun 2020 sebesar 177 jenis alat dan Tahun 2019 sebesar 125 jenis alat. Sedangkan capaian Tahun 2021 sebesar 121%, Tahun 2020 sebesar 137% dan Tahun 2019 sebesar 100%.

Grafik, Jumlah Ruang lingkup pelayanan



- Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi  
Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 187 dengan target jangka menengah pada rencana strategis tahun 2021 sebesar 155 terdapat peningkatan sebesar 121%.
- Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Tidak ada Acuan atau pun Standar Nasional yang bisa dibandingkan.

6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
  - a. Analisa penyebab keberhasilan kinerja yaitu :
    1. Tersedianya Sumber daya yang kompeten.
    2. Penambahan pelayanan uji produk, uji profisiensi dan pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan dan alat ukur.
7. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya
  - a. Mudah mendapatkan akses informasi dokumen standar
  - b. Narasumber dari luar yang professional mudah diakses.
  - c. Kemampuan dari sumber daya pelaksana yang berpengalaman.
  - d. Alokasi dana untuk menunjang kegiatan ini sebesar Rp322.176.000,- realisasi sebesar Rp266.904.500,- atau 82,84%.
8. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja  
Terdapat kegiatan penyusunan dan uji coba metode serta pengadaan peralatan alat ukur.

### KPI.3 Penambahan ruang lingkup yang terakreditasi

Ruang lingkup yang terakreditasi adalah jumlah jenis layanan yang terakreditasi sesuai persyaratan yang tercantum dalam dokumen acuan nasional (SNI/PERBA dll) atau internasional (ISO/IEC/NIST/ASTM dll). Akreditasi diberikan oleh Lembaga/Instansi yang berwenang (KAN/ BAPETEN / PPSDM/ BNSP).

Target yang ditetapkan Tahun 2021 adalah 60 ruang lingkup.

**Tabel KPI.3**  
**Penambahan ruang lingkup yang terakreditasi**

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2021	2021
KPI.3	Jumlah ruang lingkup Akreditasi	Tata Operasional	60 Lingkup Akreditasi	79

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini Target indikator kinerja yang ditetapkan 60 dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 79, maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator ini **Sangat Baik**.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
KPI.3	Penambahan ruang lingkup yang terakreditasi	Tata Operasional	1	1	5	3	0	24	300%	0	480 %

Realisasi penambahan ruang lingkup yang terakreditasi tahun ini 24 lingkup dan realisasi tahun 2019 ada 3 lingkup dan capaian kinerja tahun ini sebesar 480% dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 sebesar 300%, maka dapat dinyatakan tercapai.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi  
Realisasi kinerja tahun 2021 jumlah akreditasi 24 lingkup sehingga tidak dibandingkan dengan target jangka menengah.
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)  
Tidak ada Acuan atau pun Standar Nasional yang bisa dibandingkan
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.  
Analisa penyebab keberhasilan capaian kinerja yaitu :  
Jadwal survailen/akreditasi yang bersamaan pada tahun 2021 ada 3 Laboratorium (Lab. Pengujian/Kalibrasi Alat Kesehatan dan Alat Ukur Standar, Lab PRUK, Lab Inspeksi Sarana dan Prasarana) serta kesiapan seluruh personil Laboratorium dengan personil Tata Operasional dalam menghadapi Survailen/Akreditasi sehingga target kinerja tercapai.
6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
  - a. Pelaksanaan kegiatan harus berazaskan kepada kewajaran, transparansi, dan efisiensi serta pembiayaan mengacu pada standar biaya umum (SBU)
  - b. Alokasi anggaran dalam DIPA sebesar Rp443.486.000,- dan realisasi sebesar Rp399.300.000,- atau 90.04%.
7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja  
Kebutuhan untuk Jaminan pelayanan sesuai dengan Permenkes no 54 tahun 2015 dan Standar Nasional Indonesia

serta kepercayaan pelanggan pada Lembaga yang terakreditasi.

#### KPI.4 Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki

SOP yang terdapat di BPFK Jakarta terdiri dua jenis yaitu SOP Administrasi dan SOP teknis. SOP Administrasi meliputi SPM dan SOP-AP, sedangkan SOP Teknis terdiri dari Prosedur Operasional dan Metode kerja.

Target yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah 45 SOP.

**Tabel KPI.4**  
**Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki**

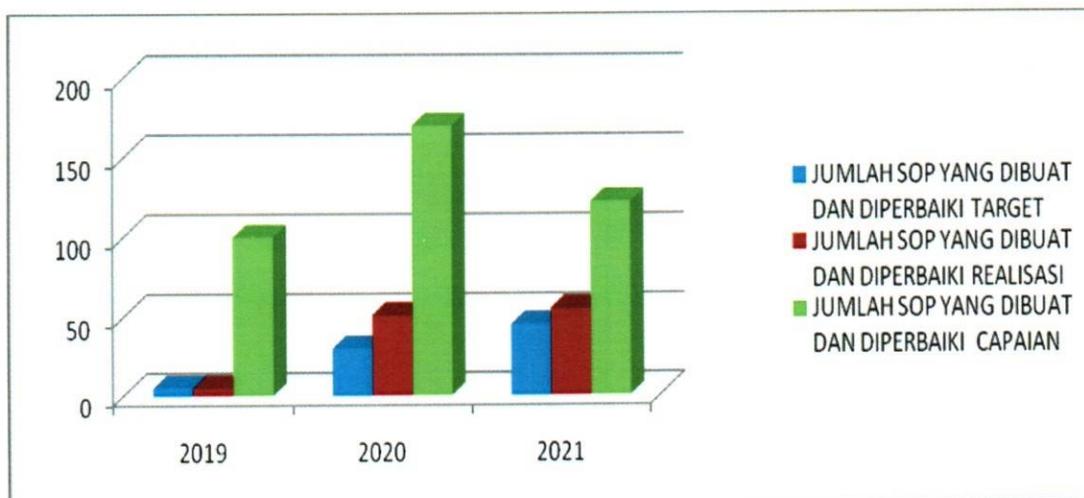
No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2021	2021
KPI.4	Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki	Tata Operasional	45 SOP	54

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini  
Target indikator kinerja tahun ini sebesar 45 SOP dan realisasi kinerja tahun ini 54 SOP, maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator itu **Sangat Baik** tingkat efektifitas ini dapat ditunjukkan dengan sudah dilakukan perbaikan pada Sistem Operasional Prosedur (SOP).
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
KPI.4	Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki	Kasi Tata Operasional	5	30	45	5	51	55	100%	170%	122%

Realisasi jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki tahun ini sebanyak 55 dan tahun 2020 sebanyak 51 dengan capaian Tahun 2020 sebesar 170%, Tahun 2019 sebesar 100% dan Tahun 2021 sebesar 122%, maka dapat dinyatakan ada yang melebihi target atau sesuai target mengikuti kebutuhan pada tahun berjalan.

Grafik, Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki



3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)
5. Tidak ada Acuan atau pun Standar Nasional yang bisa dibandingkan

6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan :

1. Perbaikan SOP sesuai kebutuhan proses atau standar dalam rangka tindak lanjut dari audit internal dan monitoring evaluasi.
  2. Perbaikan SOP rutin minimal 1 tahun merupakan prosedur pengendalian dokumen
7. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya
1. Penggunaan anggaran sesuai Standar Biaya Umum
  2. Alokasi anggaran dalam DIPA sebesar Rp659.588.000 dan realisasi sebesar Rp624.049.058,- atau 94,61%
8. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu
1. Kegiatan kaji ulang dokumen dan pemeliharaan akreditasi berkala
  2. Kegiatan pembuatan dan revisi metode Kerja

KPI.5 Tingkat Keandalan alat ukur dan kalibrator

Keandalan alat ukur dan kalibrator adalah kelayakan alat ukur yang dapat dinilai antara lain melalui rekalisasi di Institusi kalibrasi yang terakreditasi, yang hasilnya dibandingkan dengan akurasi alat ukur yang terdapat di spesifikasi alat tersebut.

Alat ukur dan kalibrator yang belum dapat di rekalisasi maka dilakukan penjaminan mutu alat tersebut melalui pengecekan antara, uji banding, uji profisiensi dan interkomparasi

Target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 55%.

**Tabel KPI.5**  
**Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Sesuai Jadwal**

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2021	2021
KPI.5	Persentase Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator	Tata Operasional	100%	43,14%

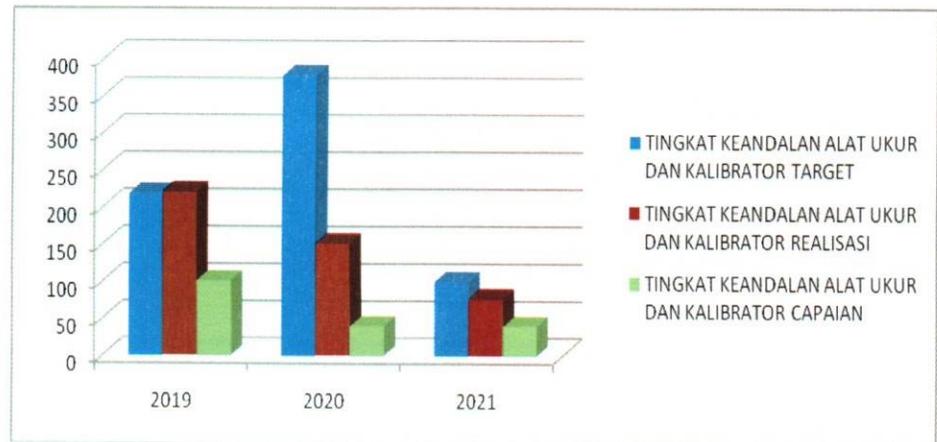
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini  
 Target kinerja yang ditetapkan pada tahun ini sebesar 350 alat dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 151 alat, maka dapat dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indicator menurun.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
KPI.5	Tingkat Keandalan alat ukur dan kalibrator	Tata Operasional	218	378	350	220	151	151	101%	40,37 %	43,14%

Realisasi kinerja Tahun 2020 sebesar 151 alat, Tahun 2019 sebesar 220 alat dan Tahun 2018 sebesar 275, sedangkan capaian kinerja Tahun 2020 sebesar 40,37%, Tahun 2019 sebesar 101% dan Tahun 2018 sebesar 100%, maka dapat dinyatakan ada perkembangan kinerja yang telah meningkat

namun terjadi penurunan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi covid-19.

Grafik, Jumlah Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Sesuai Jadwal



3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2020 sebesar 151 alat dengan target jangka menengah pada rencana strategis BPFK terjadi penurunan.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Tidak ada Acuan atau pun Standar Nasional yang bisa dibandingkan.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisa penyebab kegagalan :

- a. Alat Ukur masih dipakai pelayanan di Fasyankes

- b. Keterbatasan penyedia kalibrasi alat ukur antara lain Layanan SNSU BSN dan Lab Kalibrasi alat standar membatasi volume pada awal pandemi.
  - c. Terbatasnya anggaran kalibrasi.
6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya
- 1. Penggunaan Laboratorium Kalibrasi AUS BPFK Jakarta sesuai kemampuan
  - 2. Seleksi Pemilihan penyedia kalibrasi pada instansi pemerintah misal BATAN, SNSU BSN, Dit.Metrologi
  - 3. Peralatan yang tidak dapat dilakukan recalibrasi yang tidak ada penyedia, maka dilakukan verifikasi terhadap alat sejenis.
  - 4. Anggaran Pemeliharaan Alat Pengujian Kalibrasi sebesar Rp951,203,000 telah direalisasi sebesar Rp917,209,926 ( 96.42%)
7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
- 1. Kegiatan yang menunjang : pengecekan antara dan pertemuan teknis antar laboratorium
  - 2. Koordinasi antara jadwal recalibrasi dengan jadwal pelayanan BPFK Jakarta

KPI.6 Institusi Penguji Fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan Institusi Penguji fasilitas kesehatan (IPFK) milik pemerintah dan swasta yang adalah IPFK yang mendapat izin operasional dari Ditjen Yankes. Perpanjangan izin operasional IPFK dapat diberikan setelah terakreditasi oleh KAN. Salahsatu persyaratan yang harus dipenuhi dengan mengikuti uji profisiensi alkes yang diselenggarakan oleh BPFK Jakarta sesuai dengan permenkes 54 tahun 2015.

Target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 70%.

**Tabel KPI.6**

**Prosentase Peserta Uji yang memenuhi persyaratan**

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2021	2021
KPI. 6	Persentase Institusi Penguji fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan	Bimbingan Teknis & Kemitraan	70%	75%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini Target indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 70% dan realisasi kinerja sebesar 75%, maka dinyatakan bahwa pencapaian berdasarkan indicator kinerja itu Sangat **Memuaskan**.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
KPI.6	Persentase IPFK yang memenuhi persyaratan	Kasi Bimbingan Teknis dan Kemitraan	100%	50%	70%	96%	91%	75%	96%	182%	113%

3. Jika realisasi indikator ini dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 113% dan tahun 2020 sebesar 182%, 2019 sebesar 96%. Maka dapat dinyatakan ada peningkatan dalam persentase capaian tahun 2021, karena adanya peningkatan target 2020 yaitu 50% dan 2021 sebesar 70%.

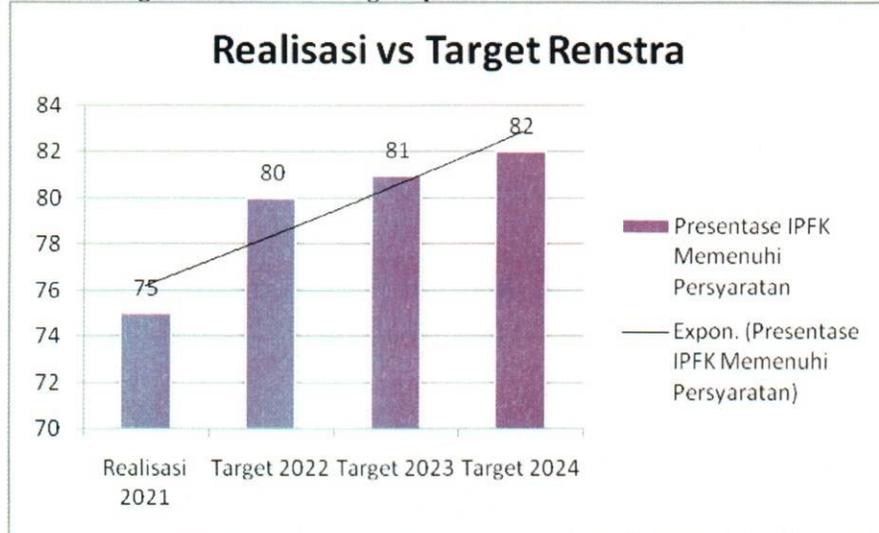
### GRAFIK PERSENTASE IPFK YANG MEMENUHI PERSYARATAN



4. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Jika dibandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah capaian tahun ini mencapai 79%, hampir memenuhi target jangka menengah sebesar 82% dengan selisih hanya 3%.

Grafik Perbandingan Realisasi dan Target 1 pada subtansi Kemitraan dan Bimtek 1a



5. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Belum ada target secara nasional yang ditargetkan oleh regulator dalam hal ini Ditjen Pelayanan Kesehatan. Namun berdasarkan Permenkes 54 tahun 2015 , BPFK kelas A / Jakarta ditunjuk sebagai institusi pengujian Alat Kesehatan penyelenggaraan UP kalibrasi Alkes dan melakukan pendampingan, pelatihan, advokasi, serta penelitian/bimbingan teknis.

6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Salah satu faktornya adalah bertambahnya institusi pengujian fasilitas kesehatan di wilayah kerja BPFK Jakarta. Analisis penyebab keberhasilan mendekati angka 100% pada indikator ini yaitu :

BPFK Jakarta melakukan kegiatan kemitraan dan jejaring kerja serta bimtek/pelatihan pada IPFK pemerintah dan swasta sesuai pemenuhan Permenkes No 54 tahun 2015 .

IPFK tersebut telah memenuhi persyaratan Komite Akreditasi Nasional dan regulasi untuk kewajiban Institusi Penguji / Laboratorium kalibrasi untuk mengikuti Uji Profisiensi Kalibrasi Alkes. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bimbingan Teknis dan pelatihan tercapai 75% yaitu terdapat 9 IPFK sesuai persyaratan yaitu terakreditasi KAN ( 2 IPFK ) dan pemenuhan Permenkes No 54 tahun 2015 ( 7 IPFK) Pelatihan /Bimtek persiapan Lab Mandiri RS Persahabatan dan PT AIP NTT sesuai dengan Permenkes No 54 tahun 201
  - b. Penyelenggaraan Uji Profisiensi kalibrasi alkes Inkubator Lab, Infusion Pump, Timbangan bayi, Thermometer klinik, dan kalibrasi alat ukur Digital Pressure Meter dengan IPFK yang memenuhi persyaratan sebanyak 83%.
7. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
1. Kolaborasi antara Seksi Kemitraan dan Bimbingan Teknis dengan Seksi Tata Operasional serta personel teknis di Instalasi/Laboratorium BPFK Jakarta selama pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pada institusi penguji dan penyelenggaraan Uji Profisiensi Alkes dan Alat Ukur Standar. Melakukan efisiensi perjalanan dinas dan kegiatan daring/online serta meningkatkan koordinasi
  2. Alokasi anggaran dalam DIPA Bimtek pada Layanan penyelenggaraan Tupoksi UPT Vertikal Ditjen Yankes sebesar Rp270.379.000,- realisasi sebesar Rp192.251.982,- atau 71,1%.
8. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2021 BPFK melakukan program kemitraan , jejaring kerja dan promosi . Kegiatan Pengampuan di Unit Kalibrasi

Mandiri 3 RS Vertikal, kegiatan pelatihan di IPFK Pemerintah dan swasta serta bimtek kalibrasi alat ukur . Melakukan Sosialisasi kegiatan melalui webinar dan website serta medsos BPFK Jakarta. Saat BPFK Jakarta telah terakreditasi PUP 020-ID dan Personel teknis BPFK Jakarta telah memiliki kompetensi melalui uji kompetensi internal dan eksternal.

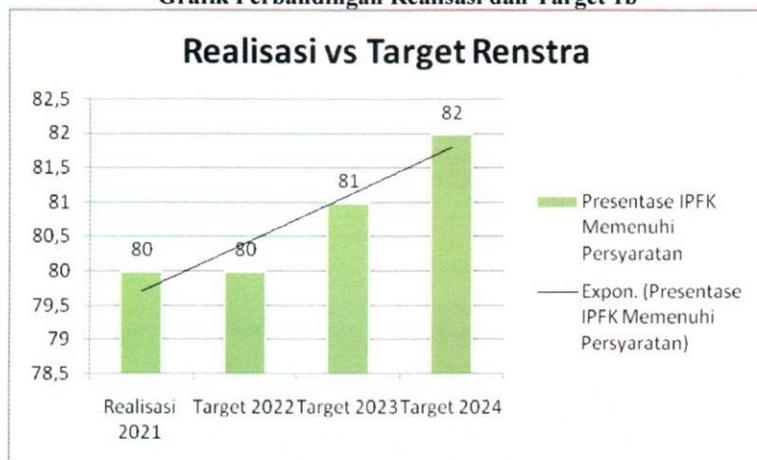
***Akumulasi Capaian Subtansi Kemitraan dan Bimtek dengan Tata Operasional***

Indeks Kinerja utama ini juga dipengaruhi oleh capaian dari Subtansi Tata Operasional berdasarkan presentasi peserta yang mengikuti kegiatan uji profisiensi alat kesehatan tahun 2021, dengan tingkat presentase 85,96 dibulatkan menjadi 86%, sehingga bila digabungkan antara capai Subtansi Kemitraan dan Bimtek dengan TAOP lalu dirata-rata tingkat keberhasilan BPFK Jakarta pada KPI.6 Persentase Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan (IPFK) yang memenuhi persyaratan adalah 80%

**Tabel Persentase IPFK Yang Memenuhi BPFK Jakarta**

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2021	2021
KPI. 6	Persentase Institusi Penguji fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan	Bimbingan Teknis dan Kemitraan	70%	80%

Grafik Perbandingan Realisasi dan Target 1b



### KPI.7 Prosentase pemenuhan kompetensi SDM

Kualitas SDM adalah SDM BPFK Jakarta teknis maupun non teknis yang mengikuti program sertifikasi sesuai kompetensi yang diselenggarakan secara internal maupun pihak penyelenggara (BNSP, LKPP, BAPETEN, PPSDM, ESDM dan K/L terkait)

Target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 65%

**Tabel KPI.7**  
**Prosentase Pemenuhan Kompetensi SDM**

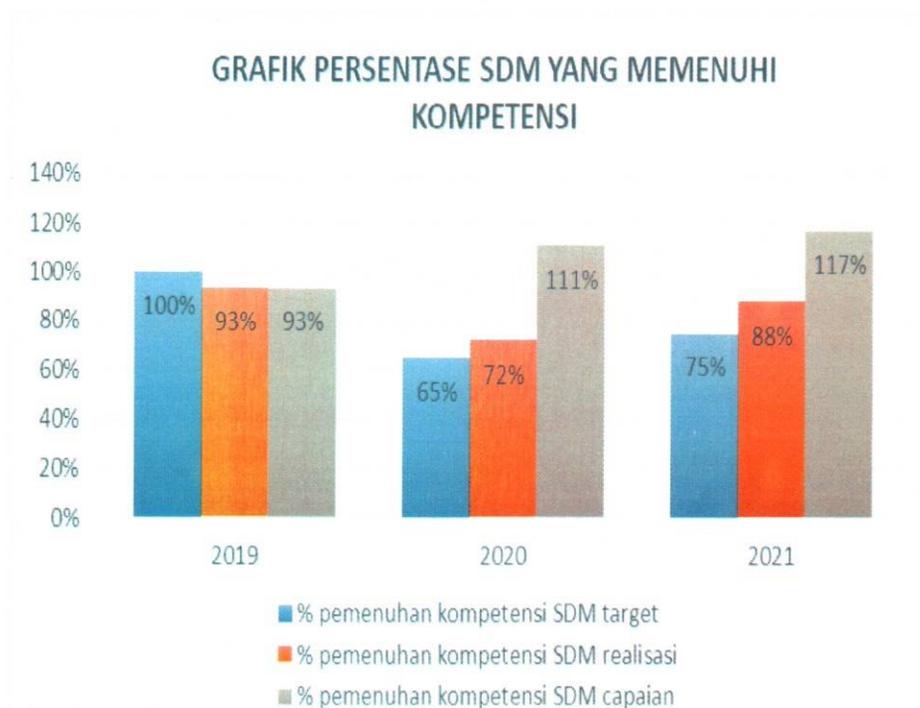
No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2021	2021
KPI.7	Persentase Pemenuhan Kompetensi SDM	Bimbingan Teknis & Kemitraan	75%	88%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini  
Target indikator kinerja tahun ini sebesar 75% dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 88 %, maka dinyatakan bahwa capaian berdasarkan indicator ini **Memuaskan**.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

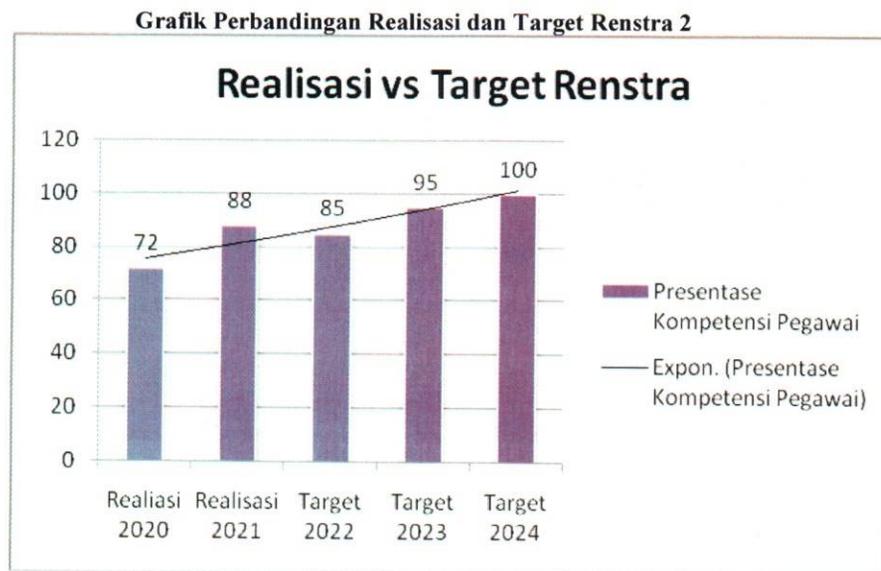
No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
KPI.7	Persentase Tenaga SDM Yang Memenuhi Kompetensi	Kasi Bimbingan Teknis dan Kemitraan	100%	65%	75%	93,4%	72%	88%	93,4%	111%	117%

3. Adapun realisasi indicator kinerja dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 sebesar 117% dan tahun 2020 sebesar 111% serta tahun 2019 sebesar 93,4%, maka dapat dinyatakan ada perkembangan kenaikan kinerja yang signifikan sebesar 6%.



4. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Jika dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah ada kekurangan sekitar 12%. Target jangka menengah 100%, sedangkan realisasi pada tahun ini 88%.



5. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Untuk mendukung misi pemerintah tahun 2020-2024 yaitu Peningkatan Kualitas Indonesia dan Misi Kemenkes yaitu Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumberdaya kesehatan serta sesuai dengan UU ASN No. 5 Tahun 2014, merujuk pada PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Setiap pegawai Negeri Sipil minimal 20 JPL/tahun wajib mendapatkan pendidikan/pelatihan dalam setiap PNS di BPFK Jakarta harus mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi. Maka realisasi kinerja 88% belum mencapai target secara nasional yaitu 100%.

6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan / penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
  - a. Sebanyak 74 Orang pegawai mengikuti sertifikasi/uji kompetensi dengan hasil 65 orang lulus, dan 1 diantaranya memuaskan dengan mendapatkan Piagam Penghargaan
  - b. Terlaksana peningkatan kapasitas SDM 111 orang pegawai melalui 36 terdiri atas 19 pelatihan internal (penyelenggara BPFK Jakarta) dan 17 pelatihan eksternal
    - Analisa penyebab keberhasilan :
      - a. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan kompetensi telah sesuai dengan perencanaan dan Training Need Analysis.
      - b. Ketersediaan alokasi anggaran sesuai kebutuhan
      - c. Personel Substansi Kemitraan dan Bimtek BPFK Jakarta telah tersertifikasi sebagai Penyelenggara Pelatihan (TOC)
      - d. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Internal Skema Pengujian Kalibrasi Alkes
    - Adapun solusi peningkatan pencapaian kinerja adalah
      - a. Melakukan kegiatan pelatihan yang terakreditasi melalui pengampunan Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang
      - b. Membangun jaringan kemitraan dengan stakeholder penyelenggara pelatihan dan uji kompetensi.
      - c. Penunjukan BPFK Jakarta sebagai Tempat Uji Kompetensi
    - Analisa kendala :
      - a. Padatnya pelayanan dan kegiatan Laboratorium dan unit kerja untuk mengikuti program pelatihan dan uji kompetensi

- b. Kurangnya monitoring dari unit kerja dan kepala instalasi serta substansi kemitraan dan Bimtek terhadap staf yang belum kompetensi
7. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya
  - a. Efisiensi biaya pelatihan dilakukan dengan mengubah pelatihan menjadi inhouse training dan metode daring juga luring (menghilangkan biaya perjalanan dinas) serta menambah jumlah kuota peserta pelatihan tanpa harus menambah biaya pelatihan.
  - b. Alokasi anggaran dalam DIPA sebesar Rp1.170.471.000 terealisasi sebesar Rp876.969.057,- atau sebesar 74,92%.
8. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
  - Keberhasilan indikator ini ditunjang oleh Program / kegiatan yaitu :
    - a. Membangun Jejaring Kemitraan dengan BRIN (BATAN, BSN / Laboratorium SNSU), Universitas Indonesia, IKATEMI, dan PT Sucofindo
    - b. Kegiatan pelatihan dan kapasitas SDM teknis serta manajemen yang sesuai kebutuhan pelayanan dan lingkup akreditasi
    - c. Melakukan Koordinasi antara substansi kemitraan dan bimtek dengan unit kerja atau penyelenggara pelatihan lainnya antara lain PT Mastan, UI dan Bapelkes Cikarang.
  - Kegagalan rendahnya pencapaian realisasi anggaran yaitu :
    - a. Terbatasnya Penyelenggara pelatihan dan sertifikasi dari eksternal serta membatasi jumlah kegiatan karena protokol kesehatan.
    - b. Perubahan metode pelatihan pembelajaran jarak jauh/daring mengurangi biaya perjalanan dinas

- c. Anggaran berasal dari PNBP yang disetor akhir tahun
- Rencana Tindak lanjut adalah melakukan :
  - a. Meningkatkan jejaring kerja dan kemitraan serta kerjasama dengan organisasi profesi instansi lain misal IKATEMI, BRIN dan BAPETEN serta LSP Kesehatan /BNSP
  - b. Melakukan pelatihan yang terakreditasi dengan Pengampuan Pelatihan dengan Bapelkes Pelatihan kalibrasi Low dan Medium Risk
  - c. Menyusun kurikulum dan Modul Pelatihan kalibrasi Medium Risk bersama Ditjen Fasyankes dan PPSDM
  - d. Mengajukan Materi Uji Kompetensi Ke BNSP untuk Skema Kalibrasi Alkes Medium dan Alat Ukur

**KPI.8 Jumlah Sertifikat /Laporan Hasil yang diterbitkan**

Sertifikat/Laporan Hasil Uji adalah Jumlah sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan oleh BPFK Jakarta melalui layanan kalibrasi, inspeksi, uji kesesuaian, TLD, film badge, pelatihan teknis dan non teknis, uji kompetensi , uji produk dan uji profisiensi yang diterbitkan dalam kurun waktu satu tahun

Target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 40000.

**Tabel KPI.8**  
**Jumlah Sertifikat/Laporan Hasil yang diterbitkan**

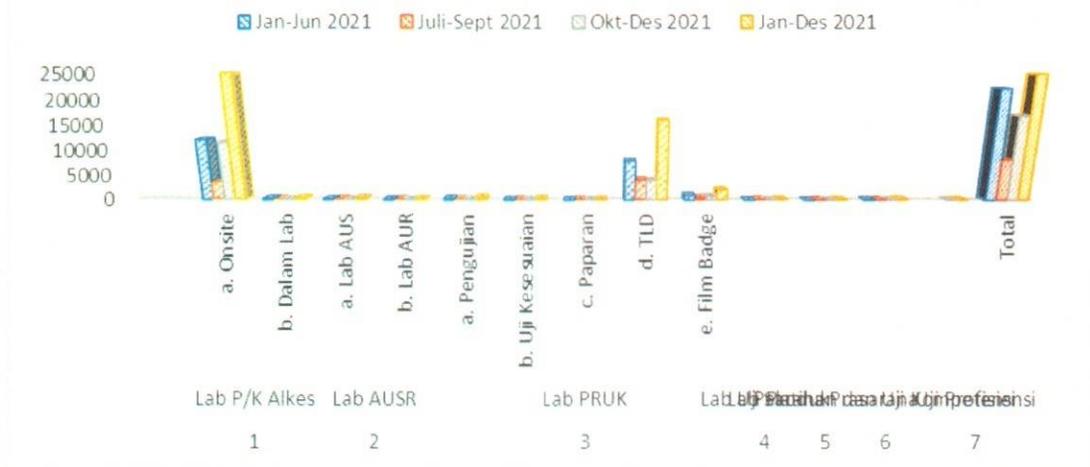
No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2021	2021
KPI.8	Jumlah sertifikat/Laporan Hasil Uji yang diterbitkan	Pelayanan Teknis	40.000 Sertifikat	47700

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini  
Target indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 40000 dan realisasi kinerja sebesar 47700 (119,25%) maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator itu **Sangat Memuaskan.**

Jumlah Penerbitan Sertifikat dan Laporan Hasil Uji  
Periode Januari - Desember 2021

No	Uraian	Jan-Jun 2021	Juli-Sept 2021	Okt-Des 2021	Jan-Des 2021
1	Lab P/K Alkes a. Onsite	12.253	3.527	11.762	<b>27.542</b>
	b. Dalam Lab	230	38	84	<b>352</b>
2	Lab AUSR a. Lab AUS	161	117	52	<b>330</b>
	b. Lab AUR	98	32	52	<b>182</b>
3	Lab PRUK a. Pengujian	255	85	127	<b>467</b>
	b. Uji Kesesuaian	105	29	87	<b>221</b>
	c. Paparan	25	5	9	<b>39</b>
	d. TLD	8.077	4.034	4.009	<b>16.120</b>
	e. Film Badge	966	420	710	<b>2.096</b>
4	Lab Uji Produk	30	2	28	<b>60</b>
5	Lab Sarana Prasarana	13	12	43	<b>68</b>
6	Pelatihan dan Uji Kompetensi	116	9	47	<b>172</b>
7	Uji Profisiensi	-	-	51	<b>51</b>
<b>Total</b>		<b>22.329</b>	<b>8.310</b>	<b>17.061</b>	<b>47.700</b>

## REKAP SERTIFIKAT DAN LHU BPFK JAKARTA 2021



1. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
KPI.8	Jumlah Sertifikat /Laporan Hasil yang diterbitkan	Koord. Sie Pelayanan Teknis	90%	35.000	40.000	79%	43.012	47.477	88%	124%	119,25 %

Capaian indikator kinerja tahun 2021 sebesar 119,25%, tahun 2020 sebesar 124%, maka dinyatakan ada kenaikan penurunan kinerja sebesar 5%. Penurunan ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 dan PPKM di tahun 2021.

2. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	KPI	PIC	TARGET					CAPAIAN	REALISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
KPI.8	Jumlah Sertifikat /Laporan Hasil yang diterbitkan	Kasi Pelayanan Teknis	35000	40000	42000	45000	50000	47700	119,25%

Jika dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah capaian tahun ini sebesar 47700 (119,25%) dan tahun 2024 sebesar 50000.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Tidak ada Acuan ataupun Standar Nasional yang bisa dibandingkan, hanya menganalisa data penerbitan sertifikat sesuai standar pelayanan minimal BPFK Jakarta.

4. Analisa Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

a. Analisa penyebab keberhasilan kinerja

1. Terlaksananya perjanjian MoU pelayanan dengan grup mitra sebanyak 17 rumah sakit
2. Terlaksananya perjanjian MoU pelayanan dengan rumah sakit EMC
3. Terlaksananya perjanjian MoU pelayanan dengan RSUI
4. Meningkatnya permintaan uji produk alat penanganan covid-19
5. Meningkatnya pelayanan inspeksi untuk tekanan negatif ruangan covid-19
6. Diadakannya program Diseminasi yakni bertujuan menambah minat pelanggan terhadap pelayanan di BPFK Jakarta

7. Adanya program DTPK (Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan) yang bekerjasama dengan dinas Kabupaten Lebak dan Sukabumi
  8. Adanya program supervisi yakni pelaksanaan dan *feedback* terhadap pelayanan BPFK Jakarta
  9. Evaluasi MoU untuk pelaksanaan pelayanan di tahun berikutnya
- b. Analisa penyebab kendala
1. Adanya pandemi covid-19 dan PPKM sehingga pelayanan sempat dihentikan sementara dan mengakibatkan terjadinya penjadwalan ulang atau reschedule pelayanan
  2. Tidak terlayannya pelayanan di luar Pulau Jawa yang menggunakan pesawat karena pandemi covid-19 dan PPKM
  3. Terlambatnya LHU diserahkan ke yantek oleh lab (BPFK Jakarta dan UPF PFK Palembang)
  4. Belum terintegrasinya pembuatan laporan dan sertifikat dari lab ke pelayanan teknis
5. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Seksi Pelayanan Teknis melakukan koordinasi secara periodik dengan Laboratorium dalam penggunaan aplikasi SIMpel sehingga petugas seksi Pelayanan Teknis tidak perlu ke laboratorium lagi untuk meminta jadwal pelayanan dan melakukan input data
6. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.
- Belum terealisasinya usul pemuktahiran aplikasi SIMpel yang terkoneksi antara penerbitan sertifikat di Seksi Pelayanan Teknis dengan pembuatan laporan Hasil dari laboratorium

## KPI.9 Pendapatan PNB

Pendapatan PNB adalah anggaran keuangan berdasarkan pendapatan bukan pajak yang dikutip melalui layanan BPFK Jakarta sesuai dengan pola tarif (PP 64 tahun 2019).

Target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar Rp8.500.000.000,-.

**Tabel KPI.9  
Pendapatan PNB**

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2021	2021
KPI.9	Pendapatan PNB	Kasubag Adum	8,5 M	10,1 M

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini  
Target indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun ini sebesar Rp8.500.000.000 dan realisasi kinerja tahun ini sebesar Rp10.142.583.300,- atau 119,32% maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator itu **Sangat Memuaskan**.

Pendapatan PNB BPFK Jakarta Tahun 2021 di dapat dari layanan :

No	Rincian Pendapatan	Jumlah (Rp)
1	Lab. AUR / AUS	405.132.000
2	Lab. ALKES	5.386.721.300
3	Lab. Uji Kesesuaian X-Ray:	792.014.000
4	Lab. Uji Produk	133.570.000
5	Lab. Pemantauan Dosis Personal	2.642.150.000
6	Lab. Sarana dan Prasarana	614.446.000

7	Bimbingan Teknik, Penelitian, dan PKL/Magang :	45.800.000
8	asa Evaluasi Hasil P/K oleh Fasyankes	122.750.000
	<b>Jumlah</b>	10.142.583.300

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
KPI.9	Pendapatan PNBP	Kasubag Adum	7.5M	8M	8,5M	8.8	9 M	10 M	118,5%	112,86%	119,32%

Garfik KPI.9 Pendapatan PNBP



Jika realisasi indikator kinerja ini dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 sebesar 119,32%, Tahun 2020 sebesar 112,86% dan Tahun 2019 sebesar 118,5%, maka dapat dinyatakan perkembangan kinerja yang sangat meningkat.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi  
Jika dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah capaian tahun ini sebesar 10,1 M dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 9,5M maka realisasi sebesar 106,76%.
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)  
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 358/KMK.06/2002 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Jika dibandingkan dengan Standar Nasional tidak ada.
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan  
Analisa penyebab keberhasilan :
  1. Adanya koordinasi yang baik dari semua pihak terkait
6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya
  1. Adanya tim PNBPN yang bertugas diantaranya melakukan followup kepada pelanggan/customer dalam hal proses atau persyaratan pembayaran.
  2. Alokasi anggaran dalam DIPA tahun 2021 sebesar Rp7.296.400.000,- terealisasi sebesar Rp6.003.369.590,- atau 82,28%.
7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Faktor penunjang keberhasilan :

1. Melakukan Peningkatan pelayanan pengujian/kalibrasi dan proteksi radiasi agar mendorong pendapatan PNBP lebih besar.
2. Melakukan koordinasi antara BPFK dengan sarpelkes

Faktor kegagalan :

1. Pembayaran dari pihak customer yang banyak pada pertengahan bulan Desember sehingga kegiatan yang dibiayai oleh PNBP tidak sepenuhnya terealisasi

#### KPI.11 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran adalah penggunaan anggaran belanja BPFK Jakarta yang terdapat dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dalam kurun waktu satu tahun berjalan.

Target yang ditetapkan di tahun 2021 sebesar 100%.

**Tabel KPI.11  
Realisasi Anggaran**

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2021	2021
KPI.11	Realisasi anggaran	Kasubag Adum	100%	92,99%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini. Target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 100% dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 92,99%, maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indicator itu **Baik**, berikut rinciannya :

RINCIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	10.719.344.000	10.594.415.600	98,83%
Belanja Barang	17.072.201.000	14.990.390.632	87,81%
Belanja Modal	10.412.782.000	9.941.285.446	95,47%
<b>JUMLAH</b>	<b>38.204.327.000</b>	<b>35.526.091.678</b>	<b>92,99%</b>

Realisasi anggaran yang mendukung langsung Indikator Keluaran Program Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta yaitu sebesar 92,99% dari total anggaran BPFK Jakarta sebesar **Rp38.204.327.000,-**. Pagu dalam DIPA BPFK Jakarta Tahun 2021 bersumber dana terdiri atas rupiah murni sebesar Rp30.907.927.000 dan sumber dana PNBK sebesar 7.296.400.000,- dan masing-masing terealisasi sebesar 29.441.443.255,- atau 95,26% dan 6.084.648.423,- atau 83,39%.

Merupakan anggaran yang terdapat pada kegiatan yang berada pada sub bagian/Koordinator Substansi yang ada di BPFK yaitu :

Table alokasi dan realisasi anggaran

PEMBAGIAN PER PIC	PAGU	REALISASI	%
TU	19.053.655.000	18.086.971.958	94,93
TAOP	3.945.713.000	3.451.393.062	87,47
BIMTEK	1.440.850.000	1.069.221.039	74,21
YANTEK	878.111.000	763.798.184	86,98
UPF	876.661.000	680.919.162	77,67
PENGADAAN MODAL	10.412.782.000	9.941.285.446	95,47
PENGADAAN BARANG	1.596.555.000	1.389.583.500	87,04
<b>Jumlah</b>	<b>38.204.327.000</b>	<b>35.526.091.678</b>	<b>92,99</b>

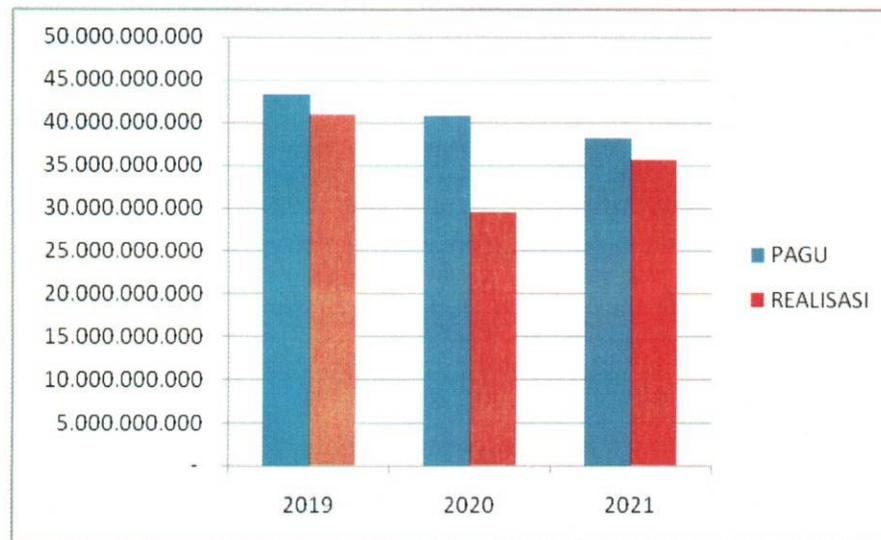
## Grafik pagu dan realisasi anggaran



- Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
KPI. 11	Realisasi anggaran	Kasubag Tata Adum	100%	100%	100%	89%	94%	79,42%	94.25 %	79,40 %	92,99%

Grafik, Realisasi anggaran dan perbandingan 2019,2020,2021



Jika realisasi indikator ini dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 sebesar 92,99%, 2020 sebesar 79,40%, Tahun 2019 sebesar 94,25% maka dapat dinyatakan **terjadi kenaikan sangat signifikan** dari tahun sebelumnya.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Jika dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah sebesar 100% capaian tahun ini sebesar 92,99%, sehingga terjadi penurunan sebesar 107,54%.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Untuk kegiatan Realisasi Anggaran tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada aturan dari Pemerintah.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Analisa penyebab kegagalan capaian :
    1. Pendapatan PNBPN meningkat sudah dipenghujung Tahun yaitu bulan Desember, sehingga kegiatan yang bersumber dari PNBPN tidak maksimal dalam merealisasikan anggarannya
  - b. Alternatif solusi yang dilakukan :
    1. Melakukan koordinasi antara subskordinator pelayanan teknis dan Bendahara Penerima terkait penagihan pembayaran jasa pelayanan pengujian/kalibrasi kepada Fasyankes
    2. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana.
6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya
- a. Pelaksanaan kegiatan harus berazaskan kepada kewajaran, transparansi dan efisiensi serta pembiayaan mengacu pada standar biaya umum (SBU).
  - b. Alokasi anggaran dalam DIPA sebesar Rp38.204.327.000,- dan realisasi sebesar Rp35.526.091.678,- atau 92,99%.
7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Pertemuan Perencanaan Internal yang melibatkan narasumber yang handal dari Kementerian Keuangan atau Kemenpan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai pelaksanaan kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta serta sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra BPFK Jakarta yang merupakan awal dari Renstra BPFK Jakarta 2020-2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta Tahun 2021 secara umum **berhasil** mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta.

Pencapaian pada tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan hal-hal yang menghambat tercapainya target diharapkan dapat ditemukan solusi serta alternatif penyelesaiannya dengan mengedepankan profesionalisme di lingkungan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta.

Untuk itu perlu dikembangkan inovasi-inovasi program yang mendukung terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029, dengan melakukan inovasi diharapkan pencapaian indikator kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta yang ada pada Renstra Kemkes 2025-2029 dapat tercapai.

Selain melakukan inovasi, yang akan dilakukan adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan mengoptimalkan sistem informasi yang saling terintegrasi baik di internal maupun eksternal Balai

Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta, diharapkan dengan adanya Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan untuk mencapai target kinerja.

Lampiran – lampiran :  
Perjanjian Kinerja

**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN  
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. J. Prastowo Nugroho, MHA.

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS

Jabatan : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 Desember 2020

Pihak Kedua, 

**Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-  
KL (K), MARS**  
NIP 196205231989031001

Pihak Pertama

  
**dr. J. Prastowo Nugroho, MHA.**  
NIP 196306121989031003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**UNIT KERJA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2021
(1)	(2)	(3)		(5)
1	Terwujudnya kepuasan pelanggan	KPI. 1	Indeks kepuasan pelanggan	88
2	Peningkatan kualitas dan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi	KPI. 2	Jumlah ruang lingkup pelayanan	155 Pelayanan
		KPI. 3	Jumlah ruang lingkup Akreditasi	60 Lingkup Akreditasi
3	Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	KPI. 4	Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki	45 SOP
4	Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas	KPI. 5	Persentase Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator	100%
5	Peningkatan pembinaan teknis institusi pengujian pemerintah dan swasta	KPI. 6	Persentase Institusi Pengujian fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan	70%
6	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM BPFK Jakarta	KPI. 7	Persentase Pemenuhan Kompetensi SDM	75%
7	Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan	KPI. 8	Jumlah sertifikat/Laporan Hasil Uji yang diterbitkan	40.000 Sertifikat
		KPI. 9	Pendapatan PNBPN	8.5 Milyar
8	Perwujudan tata kelola keuangan yang akuntabel	KPI.10	Realisasi Anggaran	100%

**Kegiatan**

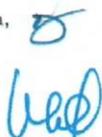
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

**Anggaran**

Rp40.685.943.000,-

Jakarta, 4 Desember 2020

Pihak Kedua,



**Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS**  
NIP 196205231989031001

Pihak Pertama,



**dr. J. Praetowo Nugroho, MHA**  
NIP. 196306121989031003

## 2. Matrik Indikator Kinerja Utama

MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPFK JAKARTA

NO	SASARAN INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	BASELINE	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya kepuasan pelanggan	KPI 1 Indeks Kepuasan pelanggan	Tata Operasional	72	74	88	90	92	94
2	Peningkatan kualitas dan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi	KPI 2 Jumlah ruang lingkup pelayanan KPI 3 Jumlah ruang lingkup Akreditasi	Tata Operasional Tata Operasional	125 54	129 54	155 80	160 85	165 70	170 75
3	Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	KPI 4 Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki	Tata Operasional	27	32	45	55	65	75
4	Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas	KPI 5 Persentase Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator	Tata Operasional	94%	94%	100%	100%	100%	100%
5	Peningkatan pembinaan teknis insitusi penguji pemerintah dan swasta	KPI 6 Persentase Insitusi Penguji fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan	Bimbingan Teknis & Kemitraan	50%	50%	70%	80%	90%	100%
6	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM BPFK Jakarta	KPI 7 Persentase Pemenuhan kompetensi SDM	Bimbingan Teknis & Kemitraan	65%	65%	75%	85%	95%	100%
7	Peningkatan pendapatan melalui produktivitas pelayanan	KPI 8 Jumlah sertifikat laporan Hasil Uji yang diterbitkan KPI 9 Pendapatan PHBP	Pelayanan Teknis Tata Usaha	24834 8 M	35000 8 M	40000 8,5 M	42000 9 M	45000 9,5 M	50000 10 M
8	Perwujudan tata kelola keuangan yang akuntabel	KPI 10 Realisasi anggaran	Tata Usaha	94%	100%	100%	100%	100%	100%

Jakarta, Maret 2021  
 Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta  
  
 Sri A. Prastowo Nugroho, MHA.  
 NIP. 195006121980031003

### 3. Laporan realisasi anggaran

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGERALTEMBAKA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN  
 ESELON I : 04 DIREJEN PELAYANAN KESEHATAN  
 WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA  
 SATUAN KERJA : 552887 BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA  
 JENIS KEWANGAN : KD KANTOR DAERAH

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	2021		2020		% REAL ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL ANGG.
				5	6	7	8					
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH											
A11	PENERIMAAN NEGARA	8.500.000.000	10.151.704.120	1.651.704.120	119,46	8.000.000.000	9.281.467.625	1.281.467.625	115,17			
A11a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
A11b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	8.500.000.000	10.151.704.120	1.651.704.120	119,46	8.000.000.000	9.281.467.625	1.281.467.625	115,17			
A12	HIBAH	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>8.500.000.000</b>	<b>10.151.704.120</b>	<b>1.651.704.120</b>	<b>119,46</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>9.281.467.625</b>	<b>1.281.467.625</b>	<b>115,17</b>			
B	BELANJA NEGARA											
B11	Ruang/Rum	38.204.327.000	35.526.091.678	( 2.678.235.322)	92,99	38.977.450.000	29.319.986.039	( 7.617.463.961)	79,40			
B11a	Belanja Pegawai	10.719.344.000	10.594.415.600	( 124.928.400)	98,83	14.154.348.000	10.568.898.740	( 3.565.450.260)	74,81			
B11b	Belanja Barang	17.072.201.000	14.590.390.832	( 2.081.810.168)	87,81	17.623.101.000	12.724.350.729	( 3.098.250.271)	80,42			
B11c	Belanja Modal	10.412.782.000	9.341.285.446	( 471.496.554)	95,47	7.990.000.000	6.046.236.570	( 953.763.430)	86,37			
B11d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
B11e	Subsidi	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
B11f	Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
B11g	Bantuan Sosial	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
B11h	Bantuan Lain-lain	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
B12	Pengguna dan Hewan	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
B12a	Belanja Pegawai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
B12b	Belanja Barang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
B12c	Belanja Modal	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
B12d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
B12e	Subsidi	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
B12f	Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
B12g	Bantuan Sosial	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
B12h	Bantuan Lain-lain	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>38.204.327.000</b>	<b>35.526.091.678</b>	<b>( 2.678.235.322)</b>	<b>92,99</b>	<b>38.977.450.000</b>	<b>29.319.986.039</b>	<b>( 7.617.463.961)</b>	<b>79,40</b>			
C	PEMBAYARAN											
C1	PEMBAYARAN DALAM NEGERI NETO	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
C11	Pembayaran Dalam Negara	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
C12	Non-Pembayaran Dalam Negara (Neto)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
C18	PEMBAYARAN LULUS NEGERI NETO	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			



#### 4. SK LAKIP



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN  
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (BPFK) JAKARTA**

Jl. Percetakan Negara No. 23A Jakarta Pusat 10570  
Telp. : (021) 4240406, 42882249, Fax : (021) 4244168, 42882237  
Email : kontak@bpfkjakarta.or.id - Website : http://bpfkjakarta.or.id



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA  
NOMOR : PS.03.01/XLVIII/1/008 /2021**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
DAN PENETAPAN KINERJA  
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA**

**KEPALA BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA**

- Menimbang**
- Bahwa penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan merupakan bagian integral dari penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan yang perlu dipertanggungjawabkan;
  - bahawa Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta berkewajiban mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja kepada Menteri Kesehatan dan menyusun Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta ;
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b perlu ditetapkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta
- Mengingat**
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689)
  - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim adalah sebagai berikut :

Pelindung : Kepala BPFK Jakarta

Penanggung Jawab : Kepala Sub Bagian Administrasi Umum

Anggota : 1. Koordinator Substansi Tata Operasional  
2. Koordinator Substansi Pelayanan Teknis  
3. Koordinator Substansi Kemitraan dan Bimtek

Sekretariat : 1. Ka. Instalasi Lab. Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan  
2. Ka. Instalasi Lab. Proteksi Radiasi dan Uji Kesesuaian X-Ray  
3. Ka. Instalasi Lab. Pengujian/ Kalibrasi/ Inspeksi Sarana Prasarana (SP)  
4. Ka. Instalasi Lab. Kalibrasi Alat Ukur Standar dan Kalibrator Alat Kesehatan  
5. Meliany Siantun SAP (Tata Usaha)  
6. Yeni Utirah Kusdiana SE (Tata Usaha)

KETIGA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data atau bahan yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta;
2. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta sebagai pertanggungjawaban Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta;
3. Menyusun Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta.
4. Melakukan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta
5. Menyusun laporan berkala BPFK Jakarta (semesteran dan tahunan)
6. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, TIM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja bertanggung jawab kepada kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan kegiatan TIM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta dibebankan kepada DIPA Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali serta diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dan perubahan terkait kebijakan atau regulasi yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 4 Januari 2021

KEPALA BALAI PENGAMANAN FASILITAS  
KESEHATAN JAKARTA,



Dr. Prasowo Nugroho, MHA  
NIP.19630621989031003



NO	KPI	PIC	Target		Realisasi	Capaian	Kendala atau faktor keberhasilan	Tindak Lanjut	Target Waktu Tindak Lanjut	Keterangan
			2021	2021						
KPI 7	Persentase Pemenuhan Kompetensi SDM	Berbagai Tahap & Kemampuan	75%	89%	117%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberhasilan 74 Orang pejabat maupun wakil/kekuasa/komisi dengan hasil 65 orang lulus dan 1 diantaranya memusikasikan dengan mendapatkan Pogram Peningkatan</li> <li>2. Terjadinya peningkatan kapasitas SDM sebagai kompetensi kejuruan dan 11 jabatan/kegiatan pemenuhan BPRK Jabatan dan 25 jabatan eselon</li> <li>3. Kendala terdapatnya penyelenggaraan sertifikasi kompetensi fungsional sesuai standar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempertahankan keberhasilan / kelibatan memenuhi target</li> </ol>	<p>Memperkuat kemampuan dan Uj kompetensi TEM sebagai salah satu indikator keberhasilan sebagai TUK oleh LPS Kesehatan dan IAS/SP tahun 2022</p>	<p>1. setiap Laporan Peningkatan KPI 7 sebagai Jarsuan Desember 2021</p>	
KPI 8	Jumlah berkahat, secara Harat Uj yang diterbitkan	Pengajuan Tahap	40.000 berkahat	47700	119,25%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor keberhasilan</li> <li>1. Terdapatnya perjanjian MoU grup mitra selanjutnya 11 Forum Saka</li> <li>2. Pelaksanaan perjanjian MoU Forum Saka E-MO</li> <li>3. Terdapatnya MoU dengan HSLU</li> <li>4. Mengalirnya pemindahan Uj Prodi ke pemenuhan covid 19</li> <li>5. Menempatkan pemetaan untuk pemenuhan aspek kesehatan negatif (uang) covid 19</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan lab untuk pengajuan awal yang pelayanan di luar pulau Jawa yang</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan pemenuhan pasokan</li> <li>3. Melakukan koordinasi dengan pemenuhan pasokan</li> <li>4. Pengajuan awal kepada e-selikal</li> </ol>	<p>Insidan 1 tahun 2022</p>		
KPI 9	Pendataan PMSB	Tata Usaha	6.5 U	10.142.588.300	119,32%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor keberhasilan</li> <li>1. Adanya koordinasi antara BPRK dan layanan terkait penyediaan pelayanan pengajuan data keadilan</li> <li>1. Faktor kendala</li> <li>1. Fasilitas melakukan penyediaan atau pengalihan pelayanan pengajuan/keadilan idayikan menjadi akhir tahun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan lab untuk pengajuan ke layanan terkait penyediaan pelayanan pengajuan data keadilan</li> </ol>	<p>Desember 2021</p>		

NO	KPI	M/C	Target		Realisasi	Capaian	Kendala atau faktor keberhasilan	Tindak Lanjut	Target Waktu Tindak Lanjut	Ketertangan
			2021	2021						
KPI 10	Raportan anggaran	Tata Usaha	100%	100%	35.526.091.678	92,7%	Faktor kendala 1. Pendataan PRRD merupakan sudah ditunggu tunggu yang Desember dan PRRD akan dilakukan dalam pelaksanaan anggarannya	1. Melakukan audit dan melakukan kegiatan per mns bolana dan melakukan audit PRRD	Desember 2021	

Menyetujui:  
 Kepala Bidang Administrasi Umum

Dr. Bayu Alkelina  
 NIP. 197705012008121002



Jakarta, Januari 2022  
 Pelaksanaan

Yeni Utami Kusdiana, SE  
 NIP. 197211151996022091



Mengetahui:  
 PPL Kepala Bidang Pengembangan Fasilitas  
 Kesehatan Jilid

Dr. Nikmat Syahrul Falah, MKM  
 NIP. 198812312002122009







DEWAN PENGURUS PUSAT  
IKATAN ELEKTROMEDES INDONESIA

Nomor: 007/Sertifikat/DPP- IKATEMI/ XII/2021

Piagam

**PENGHARGAAN**

Kepada Badan Pengaman Fasilitas Kesehatan atas di Fasilitas Pelatihan Assesor

Jakarta, 30 Desember 2021

Ketua Umum IKATEMI



Wirasa, ST, MT  
KTA.31.2009.000335

# PIAGAM PENGHARGAAN

Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang memberikan penghargaan kepada:

**BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (BPFK)  
JAKARTA**

Atas partisipasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan Pelatihan Kesehatan yang terakreditasi dan berkualitas pada Tahun Anggaran 2021

Kepala Bapelkes Cikarang



**Drs. Suherman, M.Kes**  
NIP. 196508121986031004



# PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada:

**BPFK JAKARTA**

sebagai

## PERINGKAT II

Kategori Balai UPT Vertikal

Pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan Terbaik  
dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan JFK Awards Tingkat Nasional Tahun 2021

Jakarta, 30 November 2021

Penyelenggara Penghargaan JFK Awards Tingkat Nasional Tahun 2021

Pt. Kepala Badan PPSSDM Kesehatan

dr. Kirana Pritasari, MQIH

